

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Candra, M. (2018). *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (1st ed). Prenadamedia Group.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Preadamedia Group.
- Hadrian, Endang dan Lukman hakim. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Haryati, Tuty. (2018). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Khair, D. M. (2017). *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Manalu, K. (2021). *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Cv Azka Pustaka.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mubarok, J. (2015). *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pandiangan, H. J. (2023). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*.
- Ritonga, A. U. (2024). *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*. DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sanan-As, Arijj binti ABDUR Rahman. (2018). *Etika Berpoligami*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soersono, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solihah, C. (2025). *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Pt. Refrika Aditama.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Material*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Zulfiani, dan Zainuddin. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Budi Utama.

JURNAL/ARTIKEL

- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1).
- Adnani, A. (2021). Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2 November).
- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2).
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1).

- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1).
- Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1).
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1).
- Lasmawan, I. W., & Dantes, K. F. (2024). EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(2).
- Marsal, A. (2015). Pencatatan perkawinan: Antara rukun nikah dan syarat administratif. *Jurnal An-Nur*, 4(1).
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Olivia, F. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri. *Lex Jurnalica*, 11(2).
- Prasetyo, Y., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. . (2023). PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2).
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1).
- Seknun, A. H. (2021). Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan. *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15).
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2).

- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1).
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2.
- Trisna, K. D. N. Y., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhadap Proses Perceraian pada Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3).
- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2).
- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2).

WEBSITE

- Aprilia, A. H. Z. C. (2022). Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik. Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html> (diakses pada 02 Mei 2025)
- Arianita, L. (2024). Saksi Dalam Hukum Acara Perdata. Tersedia pada <https://pn-tebo.go.id/item/saksi-dalam-hukum-acara-perdata.html> (diakses pada 05 Mei 2025)
- Ramlan, P. G. (2022). Mengenai Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata. Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/15189/Mengenai-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara> (diakses pada 01 Mei 2025)
- Wahyuni, W. (2022). Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/?page=2> (diakses pada 03 Mei 2025)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3050)

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

